

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH ADIWIYATA OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PADA MTs NIPI RAKHA AMUNTAI

Saidah¹, Sugianor², Ratna Sari³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: saidahfebriannisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tingkat keberhasilan serta faktor penentu dalam pelaksanaan program pembinaan sekolah peduli lingkungan atau Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakang studi ini berakar dari minimnya penyuluhan, lemahnya sinergi antarlembaga terkait, dan pembinaan terfokus pada binaan lama. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data digali menggunakan metode wawancara, observasi, serta studi dokumen dari sepuluh narasumber yang dipilih secara purposive. Hasil analisis triangulasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembinaan ini masih belum berjalan secara optimal. Walaupun koordinasi awal penentuan target cukup baik, pihak madrasah belum sepenuhnya memahami standar kriteria penilaian karena nihilnya penyuluhan resmi. Selain itu, sinkronisasi visi memang terjalin, namun realisasi target sangat rendah akibat minimnya bimbingan teknis secara langsung, apalagi pengawasan pasca pengisian platform SIDIA belum pernah dilakukan sama sekali. Faktor utama yang menghambat proses ini mencakup perombakan tugas pengelola, komunikasi searah, ketergantungan pada aplikasi tanpa bimbingan tatap muka, fokus instansi pada sekolah lama, hingga defisit pendanaan. Oleh karena itu, agar inisiatif berwawasan lingkungan ini sukses, pemerintah daerah sangat perlu mengoptimalkan alokasi dana, memperjelas peran, dan merutinkan kunjungan langsung, sedangkan madrasah harus proaktif menjalin komunikasi serta segera merancang tim khusus Adiwiyata demi menjaga keberlanjutan program di masa depan kelak.

Kata Kunci: Adiwiyata, Optimalisasi, Pendampingan

ABSTRACT

This study examines the success rate and determining factors in the implementation of the Adiwiyata (Environmental Awareness School) program at MTs NIPI Rakha Amuntai by the environmental agency of North Hulu Sungai Regency. The background of this study stems from minimal outreach, weak synergy between related agencies, and coaching that is heavily focused on long term participants. Using a descriptive qualitative approach, data were collected using interviews, observations, and document studies from ten purposively selected informants. The results of the triangulation analysis indicate that overall, this mentoring program has not been running optimally. Although initial coordination in determining targets was quite good, the madrasah has not fully understood the assessment criteria standards due to the lack of official outreach. Furthermore, while vision synchronization has been established, target realization is very low due to the lack of direct technical guidance, especially since post-implementation monitoring of the SIDIA platform has never been conducted at all. The main factors hampering this process include restructuring of management duties, one-way communication, reliance on applications without face-to-face guidance, the agency's focus on old schools, and funding deficits. Therefore, for this environmentally conscious

initiative to succeed, local governments urgently need to optimize funding allocation, clarify roles, and routinely conduct in-person visits. Madrasas must proactively establish communication and immediately establish dedicated Adiwiyata teams to ensure the program's sustainability in the future.

Keywords: *Adiwiyata, Optimization, Mentoring*

PENDAHULUAN

Pendidikan lingkungan hidup merupakan instrumen strategis untuk membangun karakter peduli lingkungan sejak usia dini guna merespon permasalahan global seperti pencemaran dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Pada tingkat daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara memegang peranan penting dalam pembinaan, pendampingan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Namun, data pelaksanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan dinamika penurunan partisipasi; sebanyak 12 sekolah yang pernah memperoleh status Adiwiyata periode 2015–2019 menjadi tidak aktif pada tahun 2023. Pada tahun 2024, program pembinaan sama sekali tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran, resistensi kepala sekolah/guru terhadap tambahan beban kerja, serta perubahan struktur kelembagaan di mana pengelolaan program dipindahkan ke bidang kebersihan atas arahan Bappeda dan Kepala Dinas. Upaya pembinaan kembali dilakukan pada tahun 2025 dengan mengundang 11 sekolah.

Berdasarkan observasi awal di MTs NIPI Rakha Amuntai, ditemukan permasalahan utama meliputi kurang meratanya penyebaran informasi persyaratan program, lemahnya koordinasi antara sekolah dan dinas, serta fokus pembinaan dinas yang masih terpusat pada sekolah binaan lama. Bertolak dari persoalan ini, penelitian difokuskan pada implementasi program pembinaan Adiwiyata menggunakan kerangka teori George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis proses implementasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya pada MTs NIPI Rakha Amuntai. Penelitian ini dirancang memberikan manfaat teoritis bagi studi Administrasi Publik dan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi dinas terkait serta pihak sekolah.

Kajian terdahulu menjadi bahan komparasi penting dalam landasan teori penelitian ini. Penelitian oleh Vera Tristiana dan Sukartono (2023) dalam *ELSE (Elementary School Education Journal)* menggunakan metode kualitatif fenomenologis untuk mendeskripsikan penumbuhan karakter gotong royong siswa melalui program Adiwiyata di SDN Karangasem IV Surakarta. Selanjutnya, penelitian Meriatul Adawiyah, dkk. (2024) dalam *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 1, No. 4, STIA Amuntai) meneliti implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Karias dan Tambalangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis teori Edward III. Berbeda dengan studi terdahulu yang berfokus pada dampak karakter internal sekolah dasar atau pengelolaan sampah tingkat desa, penelitian ini menyoroti efektivitas pembinaan instansi pemerintah daerah pada tingkat sekolah menengah (MTs NIPI Rakha Amuntai).

Kerangka tinjauan teoritis diawali dengan pemahaman mengenai kebijakan publik dari beberapa ahli. Menurut Dwidjowijoto dalam Iriawan (2024:1), kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan masyarakat serta merespon masalah sosial, ekonomi, dan politik. Fredrich dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan demi mencapai tujuan. Anderson dalam Irawaty Igrisa (2022:32) mengemukakan kebijakan sebagai tindakan bertujuan untuk memecahkan masalah, yang terbagi menjadi kebijakan substantif (apa yang harus dikerjakan) dan prosedural (siapa dan bagaimana diselenggarakan). Sementara itu, David Easton dalam Syafriyani (2023:3) mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk intervensi pemerintah.

Tahap-tahap kebijakan publik dijelaskan secara sistematis oleh William N. Dunn dalam Marwiyah (2022:14-16) melalui lima fase. Tahap pertama adalah penyusunan agenda (agenda setting) yang menentukan isu atau masalah publik untuk diangkat ke dalam agenda pemerintah akibat silang pendapat antar-aktor. Tahap kedua adalah formulasi kebijakan (policy formulating), di mana masalah yang masuk agenda dibahas dan dirumuskan pemecahan terbaiknya dari berbagai alternatif. Tahap ketiga merupakan adopsi atau legitimasi kebijakan yang memberikan otorisasi hukum dan kedaulatan bagi tindakan pemerintah. Tahap keempat yaitu implementasi kebijakan, yakni eksekusi operasional oleh unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya manusia dan finansial. Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan, yaitu penilaian komprehensif atas substansi, proses implementasi, hingga dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Secara etimologis, kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris *to implement* yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to carry to practical effect* untuk menimbulkan dampak (Marwiyah, 2022:36). Van Meter dan Van Horn dalam Marwiyah (2022:36) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan organisasi publik untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional mencapai tujuan. Pramono (2020:4) menegaskan bahwa proses implementasi tidak akan dimulai sebelum sasaran dan tujuan ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh Dewi (2022:120-121) yang menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan eksekusi berorientasi publik yang menentukan tingkat keberhasilan suatu program. Menurut Kasmad (2018), implementasi merupakan fenomena kompleks yang dipahami sebagai proses tindakan, keluaran (output), maupun dampak (outcome) berupa perubahan terukur di masyarakat.

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh unsur-unsur dasar yang membentuk pelaksanaannya. Menurut Subianto dalam Diah Suluh Kusuma Dewi (2022), proses implementasi merupakan tindak lanjut program yang mencakup pengambilan keputusan strategis dan operasional untuk mencapai target sasaran. Subianto menyebutkan setidaknya ada tiga unsur penting dan mutlak dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan; (2) adanya kelompok sasaran (target groups) yang menjadi objek kebijakan; dan (3) adanya pelaksana (implementor) yang bertanggung jawab. Selain itu, Subianto menekankan bahwa implementasi tidak terjadi dalam ruang hampa, sehingga faktor lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik memberikan pengaruh kuat terhadap keberhasilan atau kegagalan program.

Model teori implementasi kebijakan publik mendasarkan analisisnya pada pandangan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) serta penjelasan rinci dalam Kasmad R (2018:16-17, 20-21). Edward III mengemukakan empat faktor kunci yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung serta saling berhubungan secara timbal balik. Faktor pertama adalah komunikasi, yang meliputi penyampaian pesan dari pembuat kebijakan ke implementor secara jelas, tepat, dan konsisten

melalui dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor kedua adalah sumber daya, yang mencakup kualitas SDM (staf), kejelasan informasi teknis, wewenang formal pelaksana, dan fasilitas sarana fisik pendukung. Faktor ketiga yaitu disposisi, yang berkaitan dengan persepsi, komitmen, dan sikap pelaksana (menerima, menolak, atau netral). Faktor keempat adalah struktur birokrasi, yang mencakup keberadaan Standard Operating Procedures (SOP) internal serta tingkat fragmentasi pemisahan tanggung jawab instansi eksternal.

Teori implementasi kebijakan pendukung lainnya dihadirkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Kasmad R (2018:46-47) yang membagi kerangka analisis ke dalam tiga kelompok variabel. Kelompok variabel tersebut yaitu variabel independen (mudah tidaknya masalah digarap), variabel intervening (kemampuan keputusan menstrukturkan proses dan variabel luar), serta variabel dependen (tahapan penerimaan dan dampak kebijakan). Mazmanian dan Sabatier dalam Dwi Ma'rufah & Sholichah (2018) merincinya menjadi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan. Di samping itu, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Kasmad R (2018:42) mengemukakan model linier berbasis 6 variabel penentu kinerja, seperti standar tujuan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan disposisi pelaksana.

Pemahaman mengenai program dan Adiwiyata secara teknis merujuk pada pendapat Wirawan dalam buku Sulistyorini, dkk. (2021:192) yang mendefinisikan program sebagai rancangan kegiatan terkonsep berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan. Istilah Adiwiyata berasal dari kata Adi (besar/ideal) dan Wiyata (tempat memperoleh ilmu), yang menggambarkan tempat ideal bagi warga sekolah untuk memperoleh norma dan etika lingkungan demi pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Permen LH No. 5 Tahun 2013, empat komponen Adiwiyata meliputi kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif, dan sarana ramah lingkungan. Kerangka pemikiran mengaitkan regulasi Permen LH No. 5 Tahun 2013, tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH HSU dalam membina MTs NIPI Rakha Amuntai, fenomena masalah lapangan, serta 4 variabel Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan Adiwiyata.

METODE

Penelitian kualitatif ini berlokasi di MTs NIPI Rakha Amuntai yang beralamat di Jalan Pakapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pandangan Auerbach dan Silverstein dalam Sugiyono (2018:3), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi yang melakukan analisis serta interpretasi teks dan hasil wawancara guna menemukan makna mendalam beserta pola-pola yang bermakna dari fenomena tertentu. Pendekatan ini sangat relevan untuk menggali secara utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana proses pembinaan sekolah Adiwiyata dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah terkait pada sekolah sasaran tersebut.

Memperkuat pendekatan kualitatif tersebut, Steven dan Jennifer dalam Sugiyono (2018:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berkenaan dengan data yang bersifat naratif, di mana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fenomena implementasi Program Pembinaan Sekolah Adiwiyata oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada MTs NIPI Rakha Amuntai tidak cukup dijelaskan hanya melalui angka-angka semata, melainkan memerlukan eksplorasi kontekstual mengenai proses, faktor pendukung, serta dinamika hambatan riil yang terjadi di lapangan.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif guna memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh secara holistik. Menurut Simbolon dkk (2025:199), fokus utama pendekatan kualitatif adalah menggali makna yang tersembunyi di balik fakta, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih kaya dan kontekstual mengenai situasi yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pandangan Nilam Sari (2024:85) yang merumuskan deskripsi kualitatif sebagai metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga secara rinci menggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti.

Struktur data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:167), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui kegiatan wawancara mendalam dengan subjek penelitian serta observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer didapatkan langsung dari pejabat dinas, staf teknis, dan pihak sekolah. Sementara itu, menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara dokumen atau orang lain. Data sekunder dalam studi ini mencakup dokumen resmi instansi, peraturan perundang-undangan terkait Adiwiyata, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan sumber data dan informan penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu karena pihak tersebut dianggap paling tahu dan memiliki otoritas atas informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari unsur dinas dan sekolah.

Desain operasional penelitian ini disusun sebagai alat bantu untuk mempermudah, memfokuskan, dan mengarahkan proses pengumpulan data agar lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Pengukuran indikator implementasi Program Pembinaan Sekolah Adiwiyata mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55). Variabel penelitian ini dijabarkan ke dalam empat sub-variabel dan indikator utama, yaitu: komunikasi (meliputi transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi sosialisasi), sumber daya (meliputi kualitas SDM/staf dan sarana fasilitas), disposisi (meliputi sikap pelaksana dan komitmen pengurus), serta struktur birokrasi (meliputi penerapan Standard Operating Procedures/SOP dan tingkat fragmentasi organisasi).

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting) dengan menerapkan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan teknik observasi mengacu pada pandangan Bungin dalam Sapto Haryoko (2020:152) yang mendefinisikan observasi sebagai kegiatan pengamatan langsung menggunakan pancaindra mata disamping indra lainnya untuk merekam objek fenomena yang diteliti. Sementara itu, teknik wawancara didasarkan pada definisi Moleong dalam Sapto Haryoko (2020:165), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan pewawancara dan terwawancara melalui tanya jawab mendalam guna menggali informasi yang tidak dapat diperoleh sekadar dari pengamatan fisik semata.

Teknik pengumpulan data ketiga adalah dokumentasi, yang menurut Ridjal dalam Sapto Haryoko (2020:177) diartikan sebagai rekaman peristiwa masa lalu yang menyangkut persoalan pribadi maupun kelembagaan yang memerlukan interpretasi sesuai konteksnya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan arsip resmi serta catatan yang sudah ada untuk memperoleh data pendukung yang relevan dan gambaran yang lebih objektif. Ketiga teknik pengumpulan data kualitatif ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga data yang diperoleh dari lapangan memiliki tingkat keabsahan, kedalaman makna, serta kekuatan fakta sosial yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif.

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menerapkan model interaktif sebagaimana dirumuskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023:132-142) yang terdiri dari tiga tahapan utama secara berkelanjutan. Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan membuat abstraksi data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen agar data menjadi lebih kuat dan mantap (Sugiyono, 2023:142). Tahap kedua adalah penyajian data (data display) dalam bentuk tabel, grafik, atau pola hubungan agar tersusun secara terorganisir dan mudah dipahami (Sugiyono, 2023:137). Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan baru yang kredibel (Sugiyono, 2023:142).

Uji kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini mengacu secara menyeluruh pada pandangan Sugiyono (2023:186-193) melalui enam langkah pengujian. Langkah tersebut meliputi perpanjangan pengamatan untuk memastikan data benar-benar jujur dan pasti, peningkatan ketekunan pengamatan secara cermat dan sistematis, serta pelaksanaan triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk mengecek data dari berbagai sudut pandang. Selain itu, peneliti melakukan analisis kasus negatif terhadap data yang bertentangan, memanfaatkan bahan referensi pendukung seperti rekaman suara dan foto autentik, serta menguatkan keabsahan melalui member check yaitu mengecek kembali kesesuaian data hasil interpretasi dengan pemberi data.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Pembinaan Sekolah Adiwiyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada MTs NIPI Rakha Amuntai

1. Komunikasi
 - a. Transmisi

Transmisi informasi Program Adiwiyata antara Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan MTs NIPI Rakha Amuntai menunjukkan kesenjangan signifikan. Pihak dinas mengklaim telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka di kantor dinas untuk menyampaikan tujuan serta petunjuk teknis program secara menyeluruh. Sebaliknya, pihak sekolah secara konsisten menyatakan hanya menerima undangan Google Form yang dikirimkan kepada kepala sekolah tanpa ada tindak lanjut sosialisasi maupun arahan teknis. Hasil observasi dan dokumentasi turut memperkuat fakta bahwa tidak ada media informasi terpasang serta tidak ditemukan rekam kehadiran sekolah dalam kegiatan dinas.

Ketiadaan komunikasi langsung membuat pemahaman guru dan warga MTs NIPI Rakha Amuntai terhadap Program Adiwiyata menjadi sangat terbatas. Kesenjangan ini

mengindikasikan bahwa penyampaian pesan yang bersifat satu arah belum mampu menjangkau para pelaksana di tingkat sekolah secara optimal. Temuan ini relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa transmisi merupakan unsur komunikasi berupa penyaluran pesan dari pembuat kebijakan kepada implementor melalui saluran yang tepat dan konsisten. Kegagalan penyaluran informasi melalui saluran yang efektif ini secara langsung menghambat kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi Program Adiwiyata antara Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan MTs NIPI Rakha Amuntai menunjukkan kesenjangan persepsi. Pihak dinas mengklaim bahwa informasi teknis telah disampaikan secara rinci saat sosialisasi serta dipaparkan melalui aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Namun, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai secara konsisten menyatakan bahwa petunjuk teknis yang diterima sangat minim. Hasil observasi dan dokumentasi menguatkan fakta ini dengan tidak ditemukannya dokumen panduan tertulis maupun materi sosialisasi yang didistribusikan ke pihak sekolah.

Minimnya arahan teknis membuat pihak sekolah tidak memiliki gambaran utuh mengenai mekanisme penilaian serta langkah persiapan yang harus diambil. Ketiadaan panduan ini mengindikasikan adanya gap komunikasi yang mengganggu kesiapan sekolah dalam menjalankan program. Fenomena tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menegaskan bahwa kejelasan merupakan unsur komunikasi vital yang mewajibkan penyampaian perintah secara jelas, tepat, dan konsisten. Tanpa kejelasan petunjuk pelaksanaan, potensi timbulnya kesalahpahaman atau salah interpretasi terhadap substansi kebijakan akan makin tinggi sehingga secara langsung menghambat efektivitas implementasi di lapangan.

c. Konsistensi Sosialisasi

Konsistensi sosialisasi Program Adiwiyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan baik. Pihak dinas mengakui sosialisasi hanya dilaksanakan sekali dalam setahun secara terbatas dan terburu-buru ("kejar tayang") tanpa adanya agenda pertemuan susulan berkala. Di sisi sekolah, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai mengonfirmasi bahwa setelah penerimaan undangan Google Form pada Mei 2026, pihak dinas tidak pernah melakukan kunjungan lapangan maupun memberikan penjelasan teknis lanjutan. Hasil observasi dan dokumentasi semakin memperkuat temuan ini dengan tidak ditemukannya jadwal, undangan, atau notulensi kegiatan sosialisasi susulan.

Ketiadaan komunikasi yang berkesinambungan menyebabkan pemahaman pihak sekolah terhadap prosedur program tidak berkembang seiring berjalannya waktu. Kondisi ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menegaskan bahwa konsistensi merupakan dimensi vital dalam komunikasi kebijakan. Pesan yang disampaikan secara berulang dan konsisten sangat diperlukan agar pelaksana kebijakan di tingkat bawah dapat memahami dan menginternalisasi tujuan program secara utuh. Tanpa sosialisasi yang berkelanjutan,

transmisi informasi akan terputus sehingga secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan Program Adiwiyata di sekolah sasaran.

2. Sumber Daya

a. SDM/Staf

Kesiapan SDM/staf dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai menunjukkan kesenjangan antara pihak dinas dan sekolah. Pihak dinas mengklaim telah melakukan kunjungan pembinaan serta pendampingan pengisian aplikasi SIDIA berbasis 29 indikator, namun hasilnya belum maksimal akibat rendahnya komitmen sekolah. Sebaliknya, para guru secara konsisten menyatakan tidak pernah mendapatkan pendampingan teknis secara langsung dari staf dinas. Akibatnya, persiapan sekolah hanya terbatas pada kegiatan kebersihan rutin mingguan tanpa adanya integrasi lingkungan dalam RPP, yang diperkuat oleh tidak ditemukannya dokumen notulensi atau laporan kunjungan pembinaan.

Ketiadaan pendampingan langsung dari staf dinas menyebabkan ketidakpastian sekolah dalam memenuhi kriteria penilaian program. Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang kompeten dan memberikan pendampingan nyata sangat dibutuhkan agar kelompok sasaran dapat memahami serta menjalankan petunjuk teknis secara memadai. Terbatasnya dukungan teknis dari staf pelaksana secara langsung menghambat pencapaian kriteria sekolah Adiwiyata yang diharapkan.

b. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas dan anggaran dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai masih belum memadai. Pihak dinas menyatakan telah menyediakan bantuan fasilitas berstatus pinjaman seperti tong sampah, serta membuka pengajuan proposal bantuan sarana tambahan, meskipun dinas sendiri terkendala keterbatasan anggaran operasional pembinaan. Di sisi lain, para guru sekolah mengungkapkan bahwa tidak adanya alokasi anggaran khusus membuat penyediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah masih sangat terbatas. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat kendala ini dengan belum ditemukannya bank sampah, rumah kompos, maupun dokumen perencanaan anggaran khusus untuk pemenuhan prasarana program.

Sifat bantuan fasilitas dari dinas yang hanya bersifat sementara serta mekanisme yang menuntut inisiatif aktif pengajuan surat menyebabkan dukungan tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Keterbatasan dana yang dialami kedua belah pihak menjadi penghambat utama dalam memenuhi standar prasarana yang dipersyaratkan. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menegaskan bahwa fasilitas merupakan komponen sumber daya pendukung vital untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa ketersediaan sarana fisik yang memadai serta dukungan finansial yang pasti, proses implementasi Program Adiwiyata secara menyeluruh akan terus mengalami hambatan di lapangan.

3. Disposisi

a. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana (disposisi) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara serta MTs NIPI Rakha Amuntai dalam pelaksanaan Program Adiwiyata tergolong positif. Pihak dinas menunjukkan sikap kehati-hatian dan keterbukaan melalui koordinasi formal bersama Dinas Pendidikan HSU untuk menentukan sekolah sasaran secara transparan. Di sisi lain, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai menyambut baik serta antusias terhadap program ini. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan ini melalui adanya surat rekomendasi resmi serta kooperativitas sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kendati demikian, terdapat kesenjangan karena antusiasme pihak sekolah belum sepenuhnya diimbangi dengan kejelasan informasi mengenai alur kerja program. Kondisi ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa disposisi berkaitan erat dengan sikap, kecenderungan, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Sikap penerimaan yang baik dari pihak dinas maupun sekolah merupakan modal dasar yang krusial, namun tetap memerlukan pemahaman teknis yang utuh agar komitmen tersebut dapat terwujud dalam pelaksanaan Program Adiwiyata secara efektif di lapangan.

b. Komitmen Pengurus

Komitmen pengurus dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai belum berjalan secara optimal. Pihak dinas menilai rendahnya komitmen sekolah sebagai hambatan utama keberhasilan program, di mana penilaian berfokus pada kebersihan lingkungan fisik, sistem pengolahan sampah, dan pemenuhan 29 indikator aplikasi SIDIA. Sebaliknya, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai mengonfirmasi bahwa pemahaman mereka mengenai kriteria tersebut masih sangat terbatas akibat ketiadaan sosialisasi formal serta pendampingan langsung. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat kendala ini dengan ditemukannya pengelolaan sampah yang masih bersifat konvensional serta ketiadaan dokumen panduan SIDIA di sekolah.

Keterbatasan pemahaman pengurus sekolah menyebabkan tindak lanjut terhadap kriteria dan indikator program tidak dapat berjalan secara terstruktur. Kondisi ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa disposisi ditentukan oleh komitmen para pelaksana dalam menindaklanjuti isi kebijakan. Kesungguhan dan konsistensi pengurus di tingkat dinas maupun sekolah merupakan kunci vital untuk menjamin keberhasilan program. Lemahnya komitmen dan pemahaman pengurus dalam merespons instrumen penilaian Adiwiyata ini secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

a. Penerapan SOP

Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) monitoring Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai menunjukkan kontradiksi yang mencolok antara pihak dinas dan sekolah. Pihak dinas mengklaim telah menjalankan kegiatan pemantauan rutin sebagai bagian dari mekanisme kerja baku untuk melihat perkembangan sekolah binaan. Namun, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai secara konsisten menyatakan belum pernah

menerima kunjungan lapangan maupun arahan evaluasi dari dinas. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat kendala tersebut melalui ketiadaan buku tamu, notulensi, maupun laporan monitoring di sekolah.

Ketiadaan kunjungan pemantauan dari dinas menyebabkan proses kesiapan serta kendala yang dihadapi sekolah tidak dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Fenomena ini relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa dimensi struktur birokrasi sangat ditentukan oleh penerapan SOP sebagai pedoman operasional baku. Ketiadaan mekanisme monitoring yang berjalan secara teratur dan konsisten mengindikasikan bahwa pelaksanaan SOP pemantauan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung menghambat efektivitas keberhasilan implementasi program di lapangan.

b. Fragmentasi organisasi

Fragmentasi organisasi dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai menghambat efektivitas tindak lanjut program. Pihak dinas mengklaim telah merancang koordinasi lintas instansi dengan Dinas Pendidikan serta menyiapkan skema reward dan pembinaan lanjutan, namun pelaksanaannya terhambat oleh padatnya agenda program lain. Sebaliknya, para guru MTs NIPI Rakha Amuntai secara bulat mengonfirmasi ketiadaan umpan balik maupun evaluasi pasca pengisian SIDIA. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat kendala ini melalui ketiadaan surat pembinaan, laporan evaluasi, atau notulensi koordinasi di sekolah.

Tersebar nya beban tugas pada berbagai bidang membuat dinas tidak memberikan pendampingan yang berkesinambungan, sehingga menurunkan motivasi sekolah dalam melanjutkan program. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan di antara beberapa unit atau instansi. Tersebar nya fungsi dan tanggung jawab tanpa koordinasi yang terpadu menyebabkan tindak lanjut serta pemantauan program secara keseluruhan tidak berjalan optimal di lapangan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembinaan Sekolah Adiwiyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada MTs NIPI Rakha Amuntai

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi Formal dengan Dinas Pendidikan

Koordinasi formal antara Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung utama dalam penetapan sekolah sasaran Program Adiwiyata. Pihak dinas menjelaskan bahwa penentuan peserta tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui surat pengusulan dan rekomendasi resmi antarinstansi yang diimbangi kesamaan visi kepedulian lingkungan warga sekolah. Pihak MTs NIPI Rakha Amuntai menyambut positif dan antusias terhadap program ini. Hasil observasi dan dokumentasi menguatkan fakta tersebut melalui kebersihan fisik lingkungan sekolah yang terjaga serta tersedianya dokumen surat rekomendasi resmi dari Dinas Pendidikan HSU.

Proses seleksi antarlembaga yang terstruktur ini menjamin ketepatan sasaran serta kesiapan awal sekolah dalam mengikuti program. Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), khususnya pada variabel disposisi yang menekankan pentingnya sikap positif dan komitmen para pelaksana kebijakan. Sikap terbuka dari pihak dinas serta kolaborasi kelembagaan yang solid berhasil menciptakan iklim implementasi yang kondusif, sehingga penunjukan MTs NIPI Rakha Amuntai sebagai calon sekolah Adiwiyata memiliki dasar administratif yang kuat dan objektif.

b. Adanya Regulasi Adiwiyata sebagai Landasan Hukum Program

Tersedianya regulasi berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menjadi faktor pendukung kedua yang memberikan landasan hukum serta kejelasan arah kebijakan. Pihak dinas menegaskan bahwa regulasi ini menjadi rujukan utama untuk mengajak seluruh warga sekolah terlibat aktif dalam gerakan peduli lingkungan. Pemahaman tersebut selaras dengan persepsi pihak MTs NIPI Rakha Amuntai yang menyadari fokus program pada pemeliharaan kebersihan sekolah. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan ini melalui kebiasaan piket rutin, penyediaan tempat sampah, serta penerapan kriteria regulasi tersebut sebagai standar indikator penilaian aplikasi SIDIA.

Keberadaan acuan hukum yang seragam berhasil membangun kesamaan visi dan memperkuat legitimasi pelaksanaan Program Adiwiyata bagi dinas maupun sekolah. Fenomena ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menekankan pentingnya kejelasan sasaran dan transmisi informasi kebijakan. Regulasi formal yang dipahami secara utuh oleh pelaksana menjamin penyampaian tujuan secara tepat tanpa ambiguitas, sehingga menjadi landasan normatif yang kokoh dalam mendukung kelancaran serta keberlanjutan implementasi program di lapangan.

2. Faktor Penghambat

a. Peralihan Tupoksi Pengelola Program Adiwiyata dari Bidang Lingkungan Hidup ke Bidang P3KLH

Peralihan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan Program Adiwiyata dari Bidang Lingkungan Hidup ke Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P3KLH) menjadi faktor penghambat utama. Kepala Bidang P3KLH yang baru menjabat tiga minggu serta Koordinator Tim Adiwiyata mengakui bahwa pergantian pejabat dan masa transisi membuat sosialisasi tahun berjalan belum dapat dilaksanakan. Keterbatasan staf di bidang P3KLH yang memahami teknis Adiwiyata berdampak pada lambatnya pelayanan administrasi. Hasil observasi dan dokumentasi menguatkan kendala tersebut melalui ketiadaan kegiatan monitoring, kunjungan lapangan, maupun pendampingan pengisian SIDIA di MTs NIPI Rakha Amuntai.

Masa transisi jabatan dan minimnya staf yang menguasai teknis program menyebabkan proses pendampingan ke sekolah sasaran menjadi terhambat. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menyatakan bahwa ketersediaan serta kompetensi sumber daya

manusia (SDM) merupakan unsur vital dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kesiapan staf pelaksana akibat pelimpahan tugas baru secara langsung mengganggu transmisi informasi, pendampingan teknis, dan pemantauan program, sehingga keberhasilan implementasi Program Adiwiyata di lapangan menjadi tidak maksimal.

b. Aplikasi SIDIA Tanpa Pendampingan Tatap Muka

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA) sebagai satu-satunya media penjelasan teknis tanpa diimbangi pendampingan tatap muka menjadi faktor penghambat pelaksanaan program. Koordinator Tim Adiwiyata Dinas mengabaikan kebutuhan bimbingan langsung dengan menganggap pemaparan instrumen di dalam aplikasi sudah mencukupi bagi sekolah sasaran. Dampaknya, guru MTs NIPI Rakha Amuntai mengeluhkan sangat minimnya petunjuk teknis mengenai hal-hal yang perlu disiapkan berdasarkan wawancara Mei 2026. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat kendala ini melalui ketiadaan bimbingan tatap muka, catatan pendampingan, maupun berkas panduan teknis cetak di luar aplikasi, sehingga pihak sekolah harus mengoperasikan sistem secara mandiri.

Minimnya penjelasan langsung dari dinas menyebabkan pihak sekolah mengalami kesulitan dalam memahami target serta indikator penilaian program secara akurat. Kondisi tersebut selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), yang menekankan bahwa kejelasan informasi dan proses komunikasi kebijakan merupakan variabel penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. Menyediakan sistem informasi berbasis aplikasi tanpa adanya interaksi tatap muka menimbulkan hambatan komunikasi yang menghambat kesiapan serta kelancaran implementasi Program Adiwiyata di lapangan.

c. Prioritas Dinas Terfokus pada Sekolah Binaan Lama

Fokus dan prioritas kegiatan pembinaan dinas yang masih tertuju pada sekolah binaan lama menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program Adiwiyata di MTs NIPI Rakha Amuntai. Kepala Bidang P3KLH mengakui bahwa dinas memprioritaskan sekolah lama demi hasil yang maksimal. Akibatnya, guru MTs NIPI Rakha Amuntai menyatakan pihak sekolah tidak pernah menerima pendampingan teknis, kunjungan pemantauan, maupun umpan balik atas pengisian aplikasi. Hasil observasi dan dokumentasi memvalidasi keluhan ini melalui tidak ditemukannya jadwal monitoring, laporan pembinaan, atau kehadiran fisik tim dinas di sekolah.

Ketiadaan pendampingan langsung dan umpan balik tersebut menimbulkan ketidakpastian serta memicu penurunan motivasi sekolah untuk melanjutkan program. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), khususnya mengenai alokasi sumber daya dan kecenderungan disposisi pelaksana kebijakan. Ketimpangan prioritas pembinaan yang berfokus pada kelompok tertentu menyebabkan distribusi perhatian dan pendampingan menjadi tidak merata, sehingga menghambat efektivitas keberhasilan implementasi program secara menyeluruh di lapangan.

d. Keterbatasan Anggaran dari Dinas dan Sekolah

Keterbatasan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup serta MTs NIPI Rakha Amuntai menjadi faktor penghambat

pelaksanaan Program Adiwiyata. Kepala Bidang P3KLH menyatakan bahwa realisasi dana yang tidak sesuai pengajuan memaksa pembatasan durasi dan frekuensi kegiatan pembinaan. Pihak sekolah menegaskan ketiadaan alokasi dana khusus untuk mendukung kesiapan operasional program. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan ini melalui minimnya fasilitas sarana penghijauan, terbatasnya perjalanan dinas tim pembina, serta ketiadaan pos anggaran Adiwiyata di sekolah.

Kesenjangan antara mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 dan realisasi pendanaan di lapangan menyebabkan pemenuhan 29 indikator penilaian tidak optimal. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55), khususnya pada variabel sumber daya (resources). Keterbatasan alokasi finansial di kedua pihak memangkas agenda kerja yang krusial serta menghambat penyediaan fasilitas penunjang, sehingga menghalangi efektivitas pencapaian target implementasi program secara menyeluruh.

SIMPULAN

Implementasi Program Pembinaan Sekolah Adiwiyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara pada MTs NIPI Rakha Amuntai secara keseluruhan belum berjalan baik berdasarkan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55). Pada variabel komunikasi, transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi sosialisasi belum berjalan baik karena sekolah tidak menerima sosialisasi resmi secara langsung dan berkala. Pada variabel sumber daya, indikator SDM/staf belum optimal akibat ketiadaan pendampingan teknis, sedangkan indikator fasilitas terkendala keterbatasan sarana dan anggaran pada dinas maupun sekolah. Pada variabel disposisi, indikator sikap pelaksana dinilai cukup baik melalui koordinasi formal dengan Dinas Pendidikan, namun komitmen pengurus belum berjalan baik dalam menindaklanjuti 29 indikator penilaian pada aplikasi SIDIA. Pada variabel struktur birokrasi, penerapan SOP monitoring belum terlaksana akibat tidak adanya kunjungan lapangan, serta adanya fragmentasi organisasi yang menghambat penyampaian umpan balik program. Keberhasilan program ini ditopang oleh dua faktor pendukung, yaitu koordinasi formal dengan Dinas Pendidikan dalam penentuan sekolah sasaran yang tepat serta ketersediaan regulasi Adiwiyata sebagai landasan hukum dan kejelasan arah kebijakan. Sebaliknya, pelaksanaan program dihambat oleh empat faktor utama, meliputi peralihan tupoksi pengelola yang membuat pejabat baru belum menguasai teknis pengelolaan, penggunaan aplikasi SIDIA tanpa diimbangi pendampingan tatap muka, prioritas pembinaan dinas yang masih terfokus pada sekolah binaan lama, serta keterbatasan anggaran operasional yang memangkas frekuensi pembinaan dinas dan kesiapan mandiri sekolah. Sebagai rekomendasi perbaikan, pihak dinas disarankan memperjelas pembagian tugas, meningkatkan frekuensi sosialisasi dan kunjungan monitoring, serta mengupayakan alokasi anggaran yang memadai, pihak MTs NIPI Rakha Amuntai diharapkan lebih proaktif dan membentuk tim khusus Adiwiyata. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memberikan dukungan dana berkelanjutan, dan peneliti selanjutnya disarankan mengkaji keberlanjutan program pada sekolah-sekolah yang sudah tidak aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Haryoko, S., Bahtiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif: Konsep, teknik, dan prosedur analisis*. Badan Penerbit UNM.

Igrisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Penerbit Tanah Air Beta.



- Iriawan, H. (2024). *Teori kebijakan publik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan publik administrasi: Perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi kebijakan publik*. CV. Mitra Ilmu.
- Nilam, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif: Konsep & aplikasi*. CV. Mega Press Nusantara.
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2018).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. (2013).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistyorini, Andriesgo, J., Indadihayati, W., Watunglawar, B., Suradi, A., Mavianti, Nuramini, A., Wahyuningsih, S., Purnomo, E., & Sugiyanto, R. (2021). *Supervisi pendidikan*. DOTPLUS Publisher.
- Syafriyani, I. (2023). *Buku ajar kebijakan publik*. Deepublish Digital.